

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji latar belakang penafsiran ulang Shinzo Abe terhadap *article* 9 Konstitusi Jepang 1947 selama menjabat sebagai perdana menteri (2012-2020). *Article* 9, yang meninggalkan perang dan melarang Jepang mempertahankan kekuatan militer, telah menjadi landasan identitas pasifis Jepang sejak Perang Dunia II. Dengan menggunakan kerangka teoritis konstruktivis Alexander Wendt, studi ini menganalisis bagaimana perubahan dinamika keamanan regional, termasuk ketegasan Tiongkok dan ancaman nuklir Korea Utara, memengaruhi keputusan Abe untuk menafsirkan ulang konstitusi ini. Pernyataan Wendt bahwa "anarki adalah apa yang dibuat negara" memberikan dasar untuk memahami bagaimana identitas keamanan Jepang tidak tetap tetapi dibangun secara sosial melalui interaksi antar negara dan proses politik domestik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis kualitatif untuk menyelidiki bagaimana norma dan konstruksi identitas membentuk transisi Jepang dari pasifisme ketat ke "pasifisme proaktif". Temuan penelitian menunjukkan bahwa Abe secara strategis merekonstruksi identitas keamanan Jepang dengan membingkai interpretasi ulang bukan sebagai penolakan pasifisme, tetapi sebagai adaptasi yang diperlukan untuk tantangan keamanan kontemporer. Hal ini memungkinkan Jepang untuk memperluas kemampuan militernya dan berpartisipasi dalam operasi pertahanan diri kolektif sambil mempertahankan kesinambungan dengan nilai-nilai pasifisnya. Studi ini berkontribusi untuk memahami bagaimana identitas nasional berkembang melalui interaksi politik domestik, warisan sejarah, dan lingkungan geopolitik yang berubah, menyoroti peran kepemimpinan strategis dalam menavigasi kendala konstitusional, serta menanggapi ancaman keamanan yang muncul di Asia Timur.

Kata Kunci : Reinterpretasi Article 9, Pertahanan Jepang, Shinzo Abe, Konstruktivisme

ABSTRACT

This study examines the background of Shinzo Abe's reinterpretation of *Article 9* of the 1947 Japanese Constitution during his tenure as prime minister (2012-2020). *Article 9*, which forbade Japan from maintaining military power, has been the cornerstone of Japan's pacifist identity since World War II. Using Alexander Wendt's constructivist theoretical framework, this study analyzes how changing regional security dynamics, including China's assertiveness and North Korea's nuclear threat, influenced Abe's decision to reinterpret the constitution. Wendt's statement that "anarchy is what the state creates" provides a basis for understanding how Japan's security identity is not fixed but socially constructed through interstate interactions and domestic political processes. This study uses qualitative descriptive-analytical methods to investigate how norms and identity constructions shaped Japan's transition from strict pacifism to "proactive pacifism". The study's findings suggest that Abe is strategically reconstructing Japan's security identity by framing the reinterpretation not as a rejection of pacifism, but as a necessary adaptation to contemporary security challenges. This allowed Japan to expand its military capabilities and participate in collective self-defense operations while maintaining continuity with its pacifist values. This study contributes to understanding how national identities evolve through domestic political interactions, historical heritage, and changing geopolitical environments, highlighting the role of strategic leadership in navigating constitutional constraints, as well as responding to emerging security threats in East Asia.

Keywords: Reinterpretation of Article 9, Japan's Defense, Shinzo Abe, Constructivism